



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
7

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				✓																				

Pemprov Berlakukan SIMDA Demi WTP

PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) tahun ini akan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal itu dilakukan agar dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Demikian disampaikan

Gubernur Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan usai melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Babel belum lama ini. Erzaldi mengatakan, dari 34 Provinsi yang ada di tanah air, ada dua Provinsi yang belum
• Baca | **Pemprov...** | Hal 6

Pemprov ...

pernah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), salah satunya Babel? "Salah satu dari dua Provinsi yang belum pernah dapat WTP dari BPK, daerah kita Bangka Belitung," kata Erzaldi.

Untuk melakukan pencapaian WTP, diakui Erzaldi, dirinya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dengan menerapkan SIMDA. "Tahun ini untuk semua laporan keuangan kita akan menggunakan SIMDA BPKP, mudah-mu-

dahan tahun depan kita mendapat WTP,"ujarnya.

? Beberapa daerah di Babel yang menggunakan SIMDA, menurut Erzaldi laporan keuangan sudah mendapatkan opini WTP dari BPK. "Tidak ada kata terlambat, tahun ini untuk mencapai opini WTP kita akan gunakan SIMDA BPKP, beberapa daerah seperti Basel dan Bateng sudah menggunakan sistem itu," jelasnya. "Saya optimis, dengan SIMDA BPKP tahun ini, tahun depan kita akan meraih opini

dari Halaman 5

WTP," yakinnya.

Sementara, Kepala BPKP Babel, Raden Suhartono mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi peran BPKP dalam membantu pemerintah mewujudkan opini WTP. Pertama dijelaskannya, meningkatkan maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian interen pemerintah dalam hal laporan keuangan harus 85-90 persen atau sudah level 3. "Selama ini, Babel baru di level 2 dan baru menuju 3,"kata Raden.

Dan yang tidak kalah penting

dalam meraih opini WTP, harus ada komitmen semua pihak, mulai dari kepala daerah, PPKD, BUD, seluruh SKPD dan Sekda, sedangkan BPKP hanya bersifat mendorong saja. "Kita hanya berifat mendorong, komitmennya ada di semua pihak, mulai dari Gubernur, Sekda, PPKD, BUD dan seluruh SKPD,"terangnya.

Dirinya kembali menyakinkan, apabila tahun ini, Pemprov Babel sudah menerapkan SIMDA BPKP, maka tahun dengan opini WTP itu dapat diraih. **(bai)**